

Vol. IV No. 6, Desember 2013

# P PULIKA

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Memahami – Kembali Sumberdaya Agraria**

*Djaja Hendra*

**The Dynamics of Gated Communities and Middle Class**

*Derajat S. Widhyarto*

**Pengembangan Model Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Yogyakarta**

*Suwarjo dan Jumadi*

**Upaya Peningkatan Partisipasi Kelompok Wanita Nelayan dalam Pengembangan Wisata Kuliner dan Ekonomi Kreatif Pantai Baru, Poncosari, Kabupaten Bantul**

*Oktiva Angraini*

**Pemberdayaan Perempuan Miskin Menuju Kemandirian Ekonomi**

*Retno Kusumawranti*

**Dampak Konversi Lahan Perkebunan Sawit**

*Paharizal*

**Pemimpin Dan Kepemimpinan**

*Syakdiah*

**Pengembangan Kinerja Guru (Studi Tentang Kontribusi Kompetensi Guru, Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Miali Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

*Joko Tri Nugraha*

ISSN : 0216-2490

## DAFTAR ISI

Djaja Hendra	4 - 11	Memahami – Kembali Sumberdaya Agraria
Derajad S. Widhyharto	12 - 21	The Dynamics of Gated Communities and Middle Class
Suwarjo dan Jumadi	22 - 39	Pengembangan Model Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Yogyakarta
Oktiva Anggraini; Rahmat Slamet Suyoto; Minta Harsana	40 - 47	Upaya Peningkatan Partisipasi Kelompok Wanita Nelayan dalam Pengembangan Wisata Kuliner dan Ekonomi Kreatif Pantai Baru, Poncosari, Kabupaten Bantul
Retno Kusumawiranti	48-62	Pemberdayaan Perempuan Miskin Menuju Kemandirian Ekonomi
Paharizal	63-71	Dampak Konversi Lahan Perkebunan Sawit
Syakdiah	72 - 83	Pemimpin Dan Kepemimpinan
Joko Tri Nugraha	84 - 97	Pengembangan Kinerja Guru (Studi Tentang Kontribusi Kompetensi Guru, Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta)

## Upaya Peningkatan Partisipasi Kelompok Wanita Nelayan dalam Pengembangan Wisata Kuliner dan Ekonomi Kreatif Pantai Baru, Poncosari, Kabupaten Bantul

Oktiva Anggraini<sup>1</sup>; Rahmat Slamet Suyoto<sup>2</sup>; Minta Harsana<sup>3</sup>

oktivabiyah@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Participation of fisherwomen is needed in developing culinary tourism and coastal and fisheries management. Women in fishing communities are often illiterate and lack access to training and other opportunities to improve their marketable skills. Their scale of operation is limited by their low investment and risk-bearing abilities because they lack access to resources like credit, which prevents them from accessing technological innovations. Based on that phenomenon, UWMY held community development program (IBM) facilitated by The Ministry of Education. Through this project, the committee have identified the potential of fisherwomen and engaging women specifically can provide positive and long-lasting environmental change and improve coastal and fisheries management efforts.*

*The results showed that different innovative marketing strategies can be the resort to overcome their problem; extension course is needed to increase the participation of women in the management of culinary tourism; IBM program has stimulated entrepreneurship's fisherwomen in creating souvenirs with local raw materials and strengthening the capacity of fisherwomen. By using such a great opportunity, the government is expected to play a more extensive role in supporting the development of the culinary tourism product.*

*Key words: participation, fisherwomen, culinary tourism product.*

### Pendahuluan

Pergeseran selera wisatawan dari jenis *mass tourism* ke arah wisatawan minat khusus atau wisatawan alternatif yang lebih bersifat individual atau dalam kelompok kecil memerlukan penyikapan tersendiri dari pelaku wi-

sata. Salah satunya yang mengalami perkembangan pesat adalah wisata kuliner. Trend wisatawan sekarang yang datang ke suatu daerah wisata untuk mencari atau berburu makanan khas daerah tersebut menjadi peluang besar bagi berbagai daerah wisata di Indonesia. Di lain sisi, perubahan gaya hidup

- 1 Dosen FISIPOL UWMY
- 2 Dosen Politeknik API Yogyakarta
- 3 Dosen Universitas Negeri Yogyakarta



masyarakat dengan tingkat konsumsi yang lebih baik, mendorong mereka mencari suasana dan pelayanan wisata yang prima.

Pantai Baru Bantul, yang terletak 32 km dari Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata baru yang telah mendapat perhatian untuk dikembangkan menjadi wisata kuliner. Sejak dibukanya pantai Baru Bantul yang berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pandan Simo tahun 2010, kawasan ini berbenah diri yang pada gilirannya diharapkan dapat menyusul ketenaran lokasi kuliner lain seperti pantai Depok dan pantai Parangtritis. Ketertinggalan pantai Baru ini disebabkan sejumlah faktor seperti promosi media yang kurang, pola kerjasama *stake holder* pariwisata belum mendukung dan sarana prasarana terbatas serta pelayanan dan sanitasi kuliner kurang memuaskan pembeli. Keterseediaan kedai ikan dan pusat penjualan makanan tersebut tidak lepas dari berbagai masalah seperti kurangnya kebersihan, menu yang ditawarkan, pemasarannya, harga yang dipatok oleh pedagang tidak wajar, suasana kurang nyaman dengan banyaknya pengamen dan sebagainya.

Di kawasan pantai Baru Bantul terdapat 11 (sebelas) kelompok pengolah ikan dan pengusaha kuliner yang masing-masing kelompok beranggotakan 3-5 orang wanita nelayan. Sebagai usaha kecil menengah, pada umumnya mereka masih kesulitan dalam permodalan, manajemen keuangan dan melakukan diversifikasi usaha. Ketiadaan makanan khas atau souvenir

yang dikembangkan dari potensi lokal juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Kesulitan inipun dialami oleh dua kelompok wanita nelayan pengolah ikan yakni kelompok Ulam Mina Sari dan kelompok Baruno Wati, yang menjadi lokasi penerapan program ipteks.

Berangkat dari sederet fenomena tersebut maka perlu dicari solusi agar potensi wisata kuliner di Pantai Baru Kabupaten Bantul dapat dioptimalkan. Di samping itu, diperlukan langkah nyata untuk meningkatkan partisipasi wanita nelayan untuk mewujudkannya. Selanjutnya, Fisipol Universitas Widya Mataram melalui skim Iptek bagi Masyarakat (IbM) DIKTI 2013 menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasinya. Solusi tersebut bertitik tolak dari penelitian Anggraini (2009, 2011) tentang pemberdayaan wanita nelayan di kabupaten Bantul, yang salah satu rekomendasinya perlunya peningkatan pendampingan bagi kelompok wanita nelayan berbasis kearifan lokal.

### **Tinjauan Pustaka**

Partisipasi merupakan kunci utama dan prinsip dasar dalam proses pembangunan (Ife, 2008). Konsep partisipasi menurut Bryant dan White (1987) adalah sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain; perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu proyek pembangunan terkait dengan kehidupan masyarakat; kesadaran mengenai kontri-



busi yang dapat diberikan pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Terdapat tiga komponen dalam konsep partisipasi yaitu kesadaran (Malcote, 2001; Ife, 2008), keterbukaan (Ife, 2008; Bryan White 1987) dan perhatian (Bryan dan White;1987). Pernyataan Slamet yang disitir Mardikanto (1993) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi ditentukan oleh tiga faktor yakni kemauan, kemampuan dan kesempatan. Di antara tiga faktor tersebut, kemauan merupakan faktor kunci dalam partisipasi.

Posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan terutama dalam perencanaan pembangunan membuat partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Soetrisno, 1995).

Berbagai pengalaman pembangunan daerah menunjukkan bahwa tanpa partisipasi warga, pemerintah daerah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya.

Investasi yang ditanamkan di daerah juga tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan warga. Selain itu, sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat tidak terungkap dan standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana juga tidak tepat (Ife, 2008). Penelitian Lawrence (2010) menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi akan meminimalkan konflik di suatu kawasan. Gardner (2010) memaparkan bahwa pengawasan program akan lebih efektif jika memberdayakan masyarakat sekitar.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam empat tingkatan. *Pertama*, terdapatnya pemahaman timbal balik atau *mutual understanding* antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi penda dengan masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, komunikasi dibangun dua arah. *Kedua*, terdapat sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas *good will* pemerintah. *Ketiga*, terdapatnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. *Keempat*, terdapat usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreatifitas masyarakat. Pendapat Moeljarto dikutip Supriatna (2000) menyatakan bahwa bentuk partisipasi dapat berupa keterlibatan warga untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam pembangunan serta dalam proses perencanaan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap-



an pembangunan ditentukan oleh: kebutuhan masyarakat, ketertarikan masyarakat, adat istiadat, sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat, karakter, kemampuan dan lingkungan alam, situasi kegiatan; siapa yang berpartisipasi dan informasi yang dimiliki partisipan (Ife, 2008).

Dalam hal partisipasi, partisipasi wanita nelayan dalam pengembangan ekonomi pesisir, dari sisi pengambilan keputusan menurut Kumar (2004) pada umumnya tidak terorganisir dengan baik dan kurang efektif sebagai kekuatan politik dibanding lelaki. Padahal ketika perempuan diberi tempat dalam suatu organisasi atau proses pengambilan keputusan maka hakekatnya mereka akan membawa suatu perspektif yang meletakkan peningkatan kualitas hidup dan mata pencaharian berbasis perikanan sebagai hal yang mendasar. Selama ini wanita nelayan lebih sebagai perempuan yang bergerak di bidang perikanan sebagai bakul ikan, pengelola hasil perikanan atau pengumpul biota laut yang suami atau ayahnya berprofesi sebagai nelayan (DKP, 2001). Menurut Sharma (2003) peran perempuan di bidang perikanan di Asia ada empat yaitu: 1). Sebagai pekerja di bidang perikanan (dibayar atau tidak dibayar; 2). sebagai pekerja di pemrosesan ikan (penuh atau paruh waktu); 3). orang yang bertanggung jawab terhadap kelompok atau komunitas dan 4). sebagai pekerja di luar bidang perikanan (seperti pedagang warung). Pekerjaan yang dilakukan perempuan ini jarang dianggap sebagai pekerjaan produktif umumnya sebagai

perpanjangan dari pekerjaan domestik. Nilai sosial rendah dilekatkan kepada pekerjaan domestik dan komunitas yang dilakukan perempuan. Secara spesifik, Iksan (2003) mengamati kegiatan wanita nelayan di Pulau Jawa, yang pada akhirnya terdapat klasifikasi mulai dari kegiatan domestik, pekerja pabrik perikanan hingga menjadi *quality controler* dalam industri perikanan.

### Metode Pelaksanaan

Metode *public assistance*, ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek dan pelatihan dengan melibatkan kelompok Ulam Sari dan kelompok Baruno Wati pantai Baru Bantul dipandang sesuai dengan kebutuhan peserta IBM atau selanjutnya disebut mitra. Pelaksanaan IBM mengajak kelompok wanita nelayan agar lebih terlatih membaca persoalan mereka, mendialogkan bersama dan mencari pemecahannya melalui kelompok yang muaranya dapat menyumbang kemajuan wisata kuliner dan kegiatan ekonomi kreatif wilayah pesisir. Dengan demikian, dalam *public assistance* ini sekaligus dilakukan evaluasi dan monitoring sehingga penerapan ipteks lebih terjaga keberhasilannya. Kegiatan yang berlangsung mulai bulan Agustus hingga Desember 2013 ini melibatkan Pokglat (Kelompok Kegiatan) setempat; Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bantul dan mahasiswa.

### Hasil Dan Pembahasan

Mengacu pada penelitian Anggraini (2009, 2011) dan berkaca pada



program pengabdian lain yang sifatnya lebih *top down* maka Tim Pelaksana IbM memilih pendekatan pendampingan yang lebih partisipatif. Sebelum kegiatan dilakukan, peserta IbM diminta mengisi angket tentang materi-materi pelatihan yang diperoleh sebelumnya agar materi yang diberikan Tim IbM tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi. Materi angket ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan sosialisasi menjelang dilaksanakan temu usaha sambil menjangkau aspirasi dari wanita nelayan dan memadukan usulan Tim. *Need assesment* ini dipandang penting agar pada saat pelaksanaan penerapan ipteks partisipatif.

Materi pelatihan meliputi kewirausahaan untuk meningkatkan wawasan berusaha bagi UKM mitra yang dilanjutkan dengan pelatihan manajemen keuangan; pembukuan sederhana dan pendampingan bagi terbentuknya Koperasi. Materi kewirausahaan selanjutnya diperkuat dengan materi manajemen wisata, dengan cakupan: (1) Koordinasi, strategi promosi wisata dan aktivitas promosi; (2) Mengatur / mengontrol kualitas pelayanan kuliner; (3) Mengatasi *complain*/keluhan pelanggan; (4) Teknik komunikasi melalui telepon; (5) Melakukan kerjasama dengan biro jasa pariwisata dan hotel.

Sedangkan untuk mengatasi minimnya ketrampilan wanita nelayan, tim pelaksana IbM menekankan pentingnya diversifikasi usaha bagi wanita nelayan. Kegiatan ini meliputi pelatihan pembuatan aneka makanan olahan berbahan baku ikan berikut penge-

masannya (pengolahan pasca panen) sehingga wanita nelayan mampu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya. Resep yang ditawarkan meliputi antara lain: bakso ikan, otak-otak ikan, empek-empek ikan lele, lele crispy, peyek rebon dan stik ikan. Minimnya cinderamata khas daerah mendorong tim pelaksana IbM melaksanakan pelatihan pembuatan cinderamata khas setempat sehingga mampu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya.

Penerapan ipteks bagi kelompok wanita nelayan di pantai Baru ini, selain dengan metode pelatihan dilakukan dengan *public assistance* yakni suatu kegiatan dimana peserta didik diberi kesempatan berkonsultasi setelah pelatihan. Konsultasi diarahkan lebih pada penguasaan materi dan membahas persoalan-persoalan yang dihadapi wanita nelayan dalam mengembangkan usaha kulinernya.

Setelah dilakukan pendampingan, hasil *monev* menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan jiwa wirausaha kelompok wanita nelayan sehingga lebih kreatif dan inovatif dalam berusaha dan memperluas pasar. Di samping itu, mitra lebih menyadari pentingnya penyusunan laporan keuangan sederhana sehingga terdapat pemisahan keuangan rumah tangga dan usaha kuliner. Namun demikian, belum seluruhnya mitra atau peserta IbM melakukan pembukuan mengingat kebiasaan baru ini dipandang merepotkan. Peserta IbM semakin menyadari pentingnya menabung terutama untuk mengatasi masa paceklik.



Pelaksanaan lbM mampu merangsang tumbuhnya semangat dan keinginan mitra untuk berkoperasi sehingga mampu menekan ketergantungannya pada rentenir atau tengkulak. Akan tetapi keinginan ini terbentur oleh regulasi yang dicanangkan pemerintah tentang besarnya penyertaan modal untuk pendirian sebuah koperasi yang dinilai memberatkan. Setidaknya, meski belum terbentuk koperasi wanita nelayan, penguatan kelompok wanita nelayan terjadi dengan semakin disadarinya arti penting peran kelompok sebagai wadah aspirasi mereka dalam memperjuangkan kepentingan wanita nelayan.

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan di bidang pelayanan wisata kuliner juga dirasakan oleh peserta. Dengan resep-resep yang mudah dipraktikkan, peserta mampu menyajikan menu ciri khas yang menarik wisatawan. Bahkan pada pertemuan-pertemuan rutin di wilayah mereka, peserta lbM telah mendesiminasikan materi dan mendapat perhatian antusias dari warga. Mereka tidak lagi dirisaukan bila musim panen ikan melimpah karena telah mendapatkan materi pengolahan pasca panen. Semula, bila musim ikan melimpah, mereka hanya mengolahnya menjadi pelet ikan atau peyek untuk ikan kecil-kecil. Peningkatan ketrampilan juga diikuti dengan pemahaman mereka tentang penggunaan zat pewarna makanan yang tepat sehingga konsumen terhindar dari penyakit yang merugikan. Pengenalan produk olahan baru kepada konsumen membutuhkan waktu dan ketrampilan

pemasaran peserta serta selera konsumen. Masih terdapatnya konsumen yang lebih mementingkan harga daripada kualitas produk, sempat menciutkan keinginan produsen/mitra untuk tetap mempertahankan kualitas makanan. Untuk mengatasinya, Tim pelaksana lbM berupaya meyakinkan mitra agar turut mengedukasi konsumen dengan tetap memilih makanan olahan yang sehat.

Dalam upaya meningkatkan kreatifitas, limbah cemara yang semula hanya dibakar atau dibuang, telah mampu diubah oleh peserta lbM menjadi aneka cinderamata yang menarik dan harga terjangkau. Hal ini menegaskan bahwa dengan pendampingan yang intensif berbasis kearifan lokal, kelompok wanita nelayan dapat dioptimalkan potensinya untuk mengembangkan sumber daya yang semula tidak dilirik, menjadi usaha yang menjanjikan. Sikap antusias mitra atau kelompok wanita nelayan ini didorong oleh ketertarikan dan keinginannya memenuhi kebutuhan ekonomi dan melihat bahwa potensi alamnya mampu dikembangkan sesuai dengan kapasitasnya. Mengacu pada pendapat Mardikanto (1993), Ife (2008), selain faktor tersebut, program ini mampu menggalang solidaritas warga mengingat mereka terikat adat istiadat dan sifat-sifat komunal.

Dari sisi manajemen pariwisata, peserta semakin menyadari pentingnya menjaga kenyamanan, kebersihan, keindahan tempat wisata kuliner. Dengan maraknya pengunjung, mereka mengharapkan adanya jalinan



kerjasama dengan UKM sejenis ataupun biro perjalanan wisata. Input penataan wisata yang lebih mengedepankan peran serta wanita nelayan dari tim pelaksana IbM mendapat respon positif dari Dinas Kelautan dan Perikanan pemda Bantul. Dialog-dialog dalam temu usaha yang turut menghadirkan Kadinas DKP mampu menjembatani minimnya informasi dari kelompok wanita nelayan dan sebaliknya pihak DKP semakin memahami kebutuhan prioritas pengembangan wisata kuliner di masing-masing wilayah pesisir pantai Bantul. Tim pelaksana IbM memandang perlunya integrasi penataan wisata terpadu yang dilakukan instansi dan dinas terkait di kawasan tersebut sehingga pengunjung mendapatkan alternatif wisata yang beragam.

### Kesimpulan

- Program IbM dengan metode pelatihan, ceramah, tanya jawab diikuti *public assistance* pada kelompok wanita nelayan pada prinsipnya dapat diterapkan dalam model-model penguatan kelompok masyarakat marginal. Sebagaimana hakekatnya program pemberdayaan, peningkatan partisipasi wanita nelayan di pantai Baru, Bantul membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan, fasilitator yang memahami kondisi masyarakat dan keterbukaan sistem yang memberikan ruang gerak bagi wanita nelayan agar lebih berpartisipasi. Oleh karenanya, *lesson learning* dari program IbM ini,

di balik aspirasi wanita nelayan yang kadang kurang diperhatikan, terbatasnya ketrampilan, waktu dan teknologi, akan tetapi melalui pendampingan yang tepat, keterbukaan dan keinginan berubah peserta dapat meningkatkan partisipasi wanita nelayan dalam mengembangkan potensi wisata kuliner.

- Upaya pemberdayaan kelompok wanita nelayan hendaknya berkesinambungan utamanya dalam usaha meningkatkan pemahamannya terhadap pemanfaatan potensi pesisir secara bijak dengan cara menjaga kelestarian, keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Lebih khususnya, materi pelatihan yang diberikan lebih mengacu pada kebutuhan wanita nelayan, segmentasi serta selera pasar dan ketersediaan bahan olahan.

### Daftar Pustaka

- Anggraini, 2009, Pengembangan Model Pemberdayaan Wanita Nelayan dalam Penataan Wisata Kuliner yang Menunjang Program Minapolitan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul; *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*.
- , 2011, Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan dalam Pengembangan *Ecotourism* (Ekowisata) di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul; *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*.
- Bryant, Caroline dan White, Louise G, 1989, *Manajemen Pembangunan*

- untuk Negara Berkembang, Jakarta: LP3ES. Hal 268-299.
- Gardner, T. (2010), *Monitoring Forest Biodiversity: Improving Conservation through Ecologically Responsible Management*, London: Earthscan, pp. 291-311.
- Ikhsan, M. 2003. Laporan Pengamatan Peran Dan Kondisi Perempuan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perairan di Pulau Jawa., *Laporan*, Jakarta: The Indonesian Wildlife Fund.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 285-327.
- Kumar, K.G (Ed)., 2004, Gender Agenda. Women in Fisheries: A Collection of Articles From Samudra Report. *International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)*. Chennai.
- Lawrence, A. (2010) *Introduction: Learning from experiences of participatory biodiversity assessment. Taking Stock of Nature. Participatory Biodiversity Assessment for Policy, Planning and Practice* (ed A. Lawrence), Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1-29.
- Mardikanto, Totok, 1993, *Komunikasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Malcote, Srinivas R, et. all. 2001, *Communication for Development in The Third World: Theory and Practice for Empowerment*, New Delhi: Sage Publication. Hal 328-349.
- Sharma. C., 2003, The Impact of Fisheries Development and Globalization Processes on Women of Fishing Communities in the Asian Region. *APRN Journal* Volume 8 June 2003. <http://www.aprnet.org/journals/8/v8-2.htm> akses 18 Juni 2005.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahja, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rineka Cipta edisi 1, hal 211-212.
- Pustaka lain: Petunjuk Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan (2001)